

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika politik pembangunan di Indonesia banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama pada pemekaran wilayah yang ada di Indonesia. Tujuan politik dalam pemekaran daerah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan diseluruh bidang yang telah tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu dinamika politik pembangunan di Indonesia yaitu otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi yang adil dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Daerah-daerah otonom yang bebas, mandiri, mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam batasan wilayah yang terukur, merasa diberi tempat yang layak serta diberi rasa yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>.

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk

---

<sup>1</sup>Husni Jalil *et all*, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, 2017 (makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)), cet, ke-1, h.24.

dapat berbuat peraturan yang benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat<sup>2</sup>.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah di Indonesia, otonomi daerah telah menjadi sesuatu hal yang lumrah bagi pembangunan Indonesia khususnya sejak memasuki era reformasi. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Undang-undang Dasar 1945 terkandung makna sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri di dalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, Serta hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah, dalam hal ini ialah pemekaran daerah<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Imam Prayogo Pujiono, "Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli" (<http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2019 )

<sup>3</sup>Saeful Anwar, Skripsi: "Pemekaran Wilayah Bone Selatan" ( Makassar, UHM,2014 ) h. 2.

Selanjutnya, menyimak perkembangan politik nasional dan lokal saat ini, isu mengenai pemekaran wilayah nampaknya akan terus menjadi wacana politik yang tidak akan pudar. Hal itu karena berkaitan dengan fokus utama masyarakat lokal yang menyangkut berbagai tekanan politik seperti perasaan dan keinginan untuk mandiri. Akibatnya isu pemekaran wilayah selama ini menjadi jawaban atas persoalan perasaan ketidakadilan, perasaan tidak diperhatikan, ataupun perasaan-perasaan yang ingin memisahkan diri dari kabupaten satu ke kabupaten lain.

Pemekaran daerah merupakan salah satu cara pembentukan daerah yang telah di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 1 ayat 21 Undang-undang tersebut di sebutkan bahwa “Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru<sup>4</sup>.

Upaya pemekaran daerah dipandang sebagai sebuah acuan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang baik bagi masyarakat setempat. Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan suatu kemudahan pelayanan bagi masyarakat, Sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

---

<sup>4</sup> UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( pasal 1 ayat 21 ).

Pemekaran daerah juga merupakan suatu bentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pemekaran wilayah diberbagai daerah di Indonesia menjadi perdebatan yang tak kunjung usai karena banyak daerah-daerah yang sudah menjadi prioritas pembentukan Kabupaten baru akan tetapi banyak pula yang belum disahkan. Seiring banyaknya wilayah yang memilih untuk memekarkan diri, Kabupaten PALI merupakan salah satu wilayah yang saat ini telah melakukan pemekaran daerah dari Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten PALI merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Selatan, Jauhnya jarak yang ditempuh masyarakat untuk menuju pusat Pemerintahan Kota, Pembangunan yang selalu di anaktirikan serta pelayanan yang kurang maksimal mendorong daerah Kabupaten PALI untuk melakukan pemekaran wilayah.

Kecamatan Talang Ubi merupakan Ibukota Kabupaten PALI yang terletak di bagian Barat Laut wilayah Kabupaten PALI memiliki wilayah yang cukup luas memungkinkan suatu daerah dimekarkan dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian pengolahan potensi sumber daya alam di daerah sendiri upaya untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Namun, di balik tujuan pemekaran daerah Kabupaten PALI tersebut kita harus mengetahui apa yang melatarbelakangi pemekaran daerah

Kabupaten PALI serta apa yang menjadi alasan mendasar pemekaran tersebut sehingga benar-benar dapat dimekarkan, Apakah benar semata-mata hanya untuk mensejahterakan rakyat atau ada kepentingan dari berbagai aktor-aktor politik atau orang yang berpengaruh pada pemekaran tersebut bahkan mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi pemekaran wilayah Kabupaten PALI untuk memperoleh kekuasaan dari hasil pemisahan wilayah Kabupaten PALI itu sendiri.

Menurut Makagansa, istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (*eupieisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian ini menjadi menarik karena tidak semua wilayah yang mengajukan diri untuk dibentuk menjadi sebuah Kabupaten itu disahkan oleh Pemerintah Pusat, ada aspek administratif, formal administratif dan ada juga aspek politik kepentingan didalamnya. Konteks kajian ini ingin mengurai hal tersebut, bagaimana secara administratif dan bagaimana secara politik kepentingan.

Lalu apakah benar masyarakat Kabupaten PALI itu lebih sejahtera setelah terbentuknya Kabupaten sendiri, apakah ini benar-benar aspirasi dari

---

<sup>5</sup> Makagansa, H.R. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : FUSPAD. h. 203

masyarakat setempat atau ada ambisi dari tokoh-tokoh politik untuk berkuasa di PALI. Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN PALI DALAM PERSPEKTIF POLITIK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana proses terjadinya pemekaran daerah Kabupaten PALI ?
2. Bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana proses terjadinya pemekaran daerah Kabupaten PALI
2. Mengetahui bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam suatu penelitian diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dan diaplikasikan di kehidupan nyata, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

## **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi salah satu acuan pemahaman pada suatu program studi Ilmu Politik dalam upaya pengembangan wawasan politik tentang pemekaran daerah serta sebagai tambahan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti khususnya terhadap pemekaran daerah.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman untuk lebih mengetahui bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemekaran daerah Kabupaten PALI.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka peneliti juga menggali informasi dalam rangka melihat penelitian terdahulu guna menjadi alat kontrol penelitian bahwa penelitian yang akan dilakukan bersifat orisinal dan belum pernah diteliti orang lain serta menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian Ariandi A Zulkarnain ( 2014 ) dengan judul *“Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012”* dalam jurnal ini menyimpulkan dalam dinamika dan pembentukan suatu Kecamatan merupakan wujud otonomi daerah yang

harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ditingkat daerah maupun pusat yang bertumpu pada peraturan yang ada dan dalam proses pembangunan suatu bangsa harus selaras dengan proses demokrasi. Melihat pada prosesnya pemekaran Kecamatan Sentajo Raya terdapat politik kepentingan elit didalamnya<sup>6</sup>

Kedua, penelitian Eka Andriani (2008) dengan judul *"Dampak Pemekaran Daerah Kecamatan terhadap pelayanan publik (studi di Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi)"*. dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dampak Pemekaran Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi terhadap pelayanan publik yang berkualitas tentu ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Siliragung dalam meningkatkan pelayanan publik dalam masyarakat.

Namun demikian masyarakat masih merasa belum maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut, Pemerintah kecamatan diharapkan mampu mengatasi kekurangan yang ada guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Dan masyarakat sebagai obyek pelayanan publik diharapkan dapat menyadari dan melaksanakan prosedur/tata cara pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian Siti Nuraini ( 2011 ) dengan judul *"Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-*

---

<sup>6</sup>Ariandi A Zulkarnain ( 2014 ) *"Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012"*. Universitas Riau. h. 13-14.

<sup>7</sup> Eka Andriani (2008) *"Dampak Pemekaran Daerah Kecamatan terhadap pelayanan publik (studi di Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi)"*. Ilmu Pemerintahan. h.1

*Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kecamatan Tarumajaya)*” dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dibuat tersebut belum mampu meningkatkan pelayanan publik karena pelaksanaannya belum optimal serta efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Tarumajaya.<sup>8</sup>

Keempat, Penelitian oleh Andri Marta (2015) dengan judul “*Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian Andri Marta menunjukkan bahwa terlihat hubungan yang positif antara pemekaran kelurahan terhadap kepuasan pelayanan kependudukan di Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya. Hasil penelitian yang didapat bahwa, Tingkat pengaruh pemekaran kelurahan terhadap kepuasan pelayanan kependudukan pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya berada pada posisi kuat dan sangat kuat.<sup>9</sup>

Kelima, penelitian Abdul Hakim ( 2017 ) dengan judul “*Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Kabupaten Bengkalis)*” dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai rentang kendali (*span of*

---

<sup>8</sup> Fikarwin Zuska (2012) “*Politik Etnisitas dalam Pemekaran Daerah*”.Universitas Sumatera Utara. h.213.

<sup>9</sup> Andri Marta ( 2015 ) “*Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung)*”. Universitas Lampung.

*control*) antara DOB ( daerah otonom baru ) dan daerah induk, dampak pemekaran yang dilakukan dari kinerja ekonomi daerah terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan sedangkan dari kinerja pelayanan publik daerah terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca kebijakan pemekaran diberlakukan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang dinamika serta dampak dari pemekaran itu sendiri. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pemekaran daerah.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan- batasan tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori yang menjadi batasan penelitian skripsi ini:

Teori Kepentingan ( *Utilitarianisme Theory* ) dari Jeremy Bentham. Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the Morals and Legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup> Abdul Hakim ( 2017 ) “*Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Kabupaten Bengkalis)*.Universitas Riau. h.856.

semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teori Kepentingan, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.

Utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1784 – 1832). Dalam ajarannya Utilitarianisme itu pada intinya adalah : “Bagaimana menilai baik atau buruknya kebijaksanaan sosial politik, ekonomi dan legal secara moral” (bagaimana menilai kebijakan publik yang memberikan dampak baik bagi sebanyak mungkin orang secara moral)”.

Etika Utilitarianisme, kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sama – sama bersifat teologis. Artinya keduanya selalu mengacu pada tujuan dan mendasar pada baik atau buruknya suatu keputusan.

Ada dua kemungkinan dalam menentukan kebijakan publik yaitu kemungkinan diterima oleh sebagian kalangan atau menerima kutukan dari sekelompok orang atas ketidaksukaan atas kebijakan yang dibuat. Bentham menemukan dasar yang paling objektif dalam menentukan kebijakan umum atau publik yaitu : apakah kebijakan atau suatu tindakan tertentu dapat memberikan manfaat atau hasil yang berguna atau bahkan sebaliknya memberi kerugian untuk orang – orang tertentu.

Jadi, dalam Teori Kepentingan ( *Utilitarianisme Theory* ) dari Jeremy Bentham ini bila dikaitkan dengan pemekaran daerah dalam perspektif politik, Menurutnya tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Tingkat Kepentingan politik tersebut dapat di ukur dengan melihat banyak manfaat yang diterima atau

kerugian yang masyarakat terima setelah pemekaran tersebut dilakukan, bahwa jika Kabupaten PALI resmi memekarkan diri menjadi Kabupaten serta dapat menerapkan semua peraturan dengan baik maka manfaatnya akan lebih banyak terhadap masyarakat setelah terjadinya pemekaran maka hukum yang berjalan pada proses pemekaran tersebut benar memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat sebaliknya jika hukum itu hanya terlibat pada sebagian kelompok elit politik maka dalam teori ini masyarakat hanya mendapatkan kerugian. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori kepentingan yang didefinisikan oleh Jeremy Bentham, dan penelitian yang berjudul Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten PALI Dalam Perspektif Politik, yang di teliti dengan menggunakan Teori Kepentingan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Kepentingan Jeremy Bentham, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Pemekaran Daerah Kabupaten PALI Dalam Perspektif Politik.

### **1. Kriteria dan Prinsip Utilitarianisme.**

Ada tiga kriteria objektif dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai kebijaksanaan atau tindakan.

- a. Manfaat : bahwa kebijakan atau tindakan tertentu dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu.
- b. Manfaat terbesar : sama halnya seperti yang di atas, mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam situasi yang lebih besar. Tujuannya meminimisasikan kerugian sekecil mungkin.

- c. Pertanyaan mengenai manfaat : manfaatnya untuk siapa? Saya, dia, mereka atau kita.

Kriteria yang sekaligus menjadi pegangan objektif etika Utilitarianisme adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, kebijakan atau tindakan yang baik dan tepat dari segi etis menurut Utilitarianisme adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau tindakan yang memberikan kerugian bagi sekecil orang/ kelompok tertentu.

Atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika Utilitarianisme memiliki tiga pegangan yaitu :

- a. Tindakan yang baik dan tepat secara moral
- b. Tindakan yang bermanfaat besar
- c. Manfaat yang paling besar untuk paling banyak orang.

Dari ketiga prinsip di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga tindakan itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak orang mungkin”.

## **2. Nilai Positif Etika Utilitarianisme**

Etika utilitarianisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini justru mensistematisasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut penganutnya dilakukan oleh kita sehari-hari. Etika ini sesungguhnya menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh

orang secara rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup, khususnya dalam hal moral dan juga bisnis.

Nilai positif etika utilitarianisme adalah;

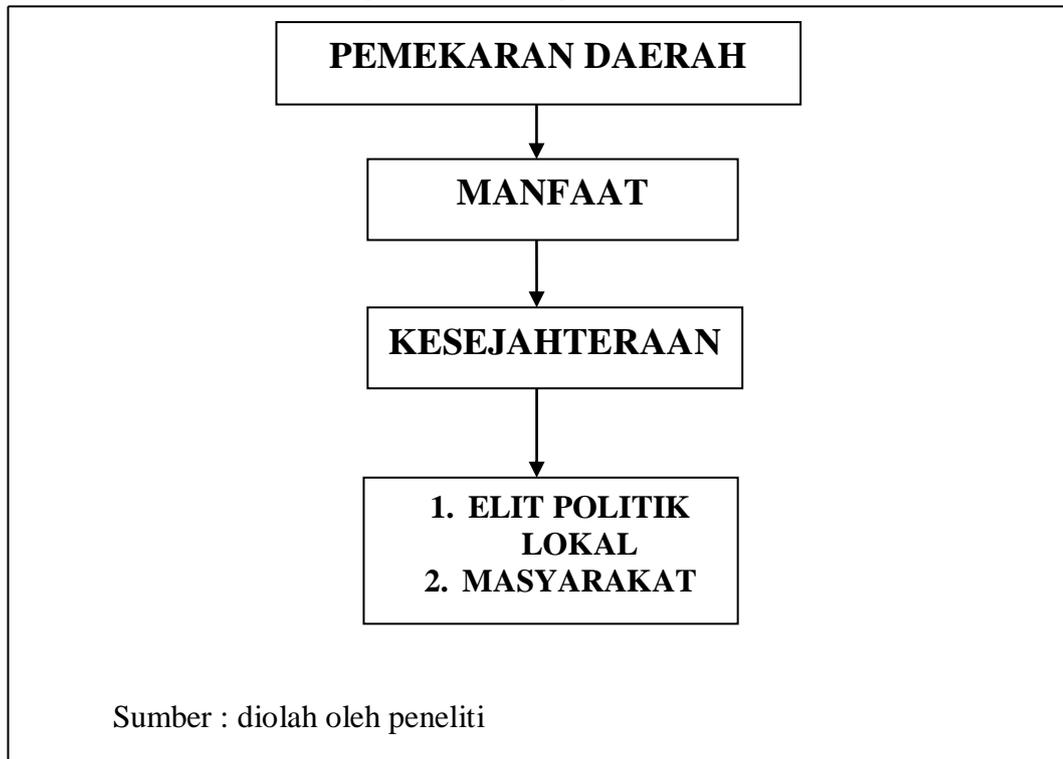
- a. Rasionalitasnya : Prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme tidak didasarkan pada aturan – aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami.
- b. Universalitas : Mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang yang melakukan tindakan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa kepentingan orang sama bobotnya. Artinya yang baik bagi saya, yang baik juga bagi orang lain.

Inti dari etika utilitarianisme adalah harapan agar kebijaksanaan atau tindakan bisnis apa pun dan dari perusahaan manapun akan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yang berkepentingan, terutama dalam jangka panjang. Tetapi kalau ini tidak memungkinkan, di mana ada pihak yang dikorbankan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Maria Armanusahwati. ( 2012 ). *Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Rental Mobil Berdasarkan Asas Keseimbangan*. Universitas Kristen Maranatha.h.11-14.

**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**



## **G. Metodologi Penelitian**

Adapun metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan / Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan

---

<sup>12</sup> Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.h.3.

akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten PALI Dalam Prespektif Politik”

## **2. Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian, secara keseluruhan berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lapangan. Data primer diperoleh peneliti menggunakan teknik lapangan dan mewawancarai informan, didasarkan atas beberapa kategori yang di anggap mewakili atas pemekaran daerah Kabupaten PALI yaitu sebagai berikut : perangkat-perangkat yang terlibat langsung pada saat proses pembentukan Kabupaten PALI serta elemen-elemen masyarakat Kabupaten PALI.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden mengenai pemekaran daerah Kabupaten PALI. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, yang dapat di kembangkan menjadi wawancara mendalam saat riset, agar mendapatkan informasi lebih akurat.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode wawancara penelitian kualitatif. Dalam penelitian kali ini, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk melengkapi data dalam menganalisis apa yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa maupun media cetak.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten PALI, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan telah melakukan pemekaran daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat dengan mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali untuk menuju pusat Kota serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dirasa masih kurang dan masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut, apakah telah sesuai dengan keinginan masyarakat atau hanya bersifat kepentingan politik semata lalu apakah masyarakat dilibatkan dalam proses itu atau hanya sebagian kelompok.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>13</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi :

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, fokus dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemekaran tersebut.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada

---

<sup>13</sup> Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.h.244

penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, serta dokumentasi.

## **H. Sistematika Penelitian Laporan**

Sistematika penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II                    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lokasi dari objek yang akan diteliti. Lokasi Kabupaten PALI dengan berfokus pada pemekaran daerahnya mulai dari sejarah hingga struktur organisasinya.

## **BAB III                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab I di kerangka teori.

## **BAB IV                    PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.